



**PENEGAKAN HUKUM MELALUI
PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN
ARSIP PRODUK HUKUM**



KHAIRUM NINSA
NIM. 1521150

2025

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DALAM PENGELOLAAN ARSIP PRODUK HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHAIRUM NINSA

NIM. 1521150

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DALAM PENGELOLAAN ARSIP PRODUK HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHAIRUM NINSA

NIM. 1521150

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khairum Ninsa

NIM : 1521150

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip
Produk Hukum**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Pekalongan, 16 Juni 2025

Yang menyatakan



KHAIRUM NINSA
NIM. 1521150

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khairum Ninsa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khairum Ninsa

NIM : 1521150

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP PRODUK HUKUM**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 16 Juni 2025

Pembimbing.



Syarifa Khasna, M.Si

NIP.199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowelaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khairum Ninsa
NIM : 1521150
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM MELALUI PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP
PRODUK HUKUM

Ujian telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198809152019031007

Penguji II

Almad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



MOTTO

*“Hidup akan terus berjalan, dan hari ini pun akan segera berlalu.
Apapun yang terasa berat hari ini, yang kini tampak sulit untuk
dijalani, kelak akan terlewati seperti halnya hari-hari kemarin yang
juga pernah terasa tak mudah”*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rasa kasih sayang yang tulus, saya ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Muhammad Sulaiman dan Ibu Kusriani sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas segala cinta, doa, perjuangan, dan pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini. Dalam setiap perjalanan yang saya lalui, ada kerja keras kalian yang tidak pernah lelah, ada doa yang mengiringi setiap malam, ada keikhlasan dalam memberi, dan ada keteguhan hati yang selalu menjadi teladan bagi saya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan sederhana bagi Bapak dan Ibu, sekaligus menjadi pengingat bahwa semua ini tak akan pernah terjadi tanpa cinta dan ridha orang tua.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Mutiara Rofiqoh, Nina Asrifah, Fahmi sulaiman yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta doa dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih atas kehadiran kalian yang menjadi penguat di saat lelah, menjadi penghibur di tengah tekanan, dan menjadi sahabat dalam segala situasi.
3. Teman Teman Prodi Hukum Tatanegara Angkatan 2021
4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan biaya perkuliahan dengan hasil jerih payah sendiri. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, terimakasih sudah sekuat ini, dan maaf jika jalan yang kuambil membuatmu kesusahan

ABSTRAK

Khairum Ninsa. 1521150. 2025. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si.

Penelitian ini membahas penegakan hukum atas Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan kearsipan dalam pengelolaan arsip produk hukum. Latar belakangnya didasari oleh lemahnya pengelolaan arsip di Sekretariat Daerah. Seperti tidak dilaksanakannya retensi arsip, tidak adanya pemusnahan arsip kedaluwarsa, minimnya tenaga arsiparis profesional, serta belum tersedianya SOP dan sosialisasi yang memadai, yang berakibat pada lemahnya kesadaran hukum dan pelaksanaan perda.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumen dan literatur. Teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan perda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda belum optimal akibat hambatan struktural, seperti kurangnya SDM dan pembagian tugas, serta kendala substansi berupa ketiadaan regulasi teknis. Dari sisi budaya hukum, kesadaran aparatur terhadap pentingnya arsip juga masih rendah. Hal ini berdampak serius terhadap pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga diperlukan langkah perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan, Peraturan Daerah, Kearsipan

ABSTRACT

Khairum Ninsa. 1521150. 2025. *Law Enforcement of Pekalongan City Regional Regulation Number 12 of 2019 on the Implementation of Archives in the Management of Legal Product Archives. Thesis of State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Syarifah Khasna, M.Si.

This study discusses the enforcement of the Regional Regulation of Pekalongan City Number 12 of 2019 concerning archival administration in the management of legal product archives. The background of the research is based on the weak archive management within the Regional Secretariat, such as the absence of regular archival retention, the lack of disposal of expired archives, the limited number of professional archivists, and the unavailability of structured Standard Operating Procedures (SOP) and adequate dissemination, all of which result in weak legal awareness and poor implementation of the regulation.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant parties as well as document and literature studies. The theory of law enforcement by Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman's legal system theory are used to analyze the factors affecting the effectiveness of the regulation's implementation.

The findings show that the implementation of the regulation has not been optimal due to structural barriers, such as a lack of competent human resources and unclear task distribution, as well as substantive issues like the absence of technical regulations. From a legal culture perspective, the awareness of government officials regarding the importance of archives remains low. This condition significantly affects public service and government accountability, thus requiring comprehensive and sustainable improvements.

Keywords: Enforcement, Regional Regulations, Archives

KATA PENGANTAR

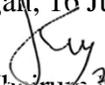
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
8. Pihak Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya.

Pekalongan, 16 Juni 2025


Khairunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Penegakan Hukum	16
B. Arsip dan Kearsipan.....	19
C. Akibat Hukum.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP PRODUK HUKUM	23
A. Gambaran Umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	23
B. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019	

Tentang Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum 26

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....51

 A. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor
 12 Tahun 2019 dalam Pengelolaan Arsip Hukum51

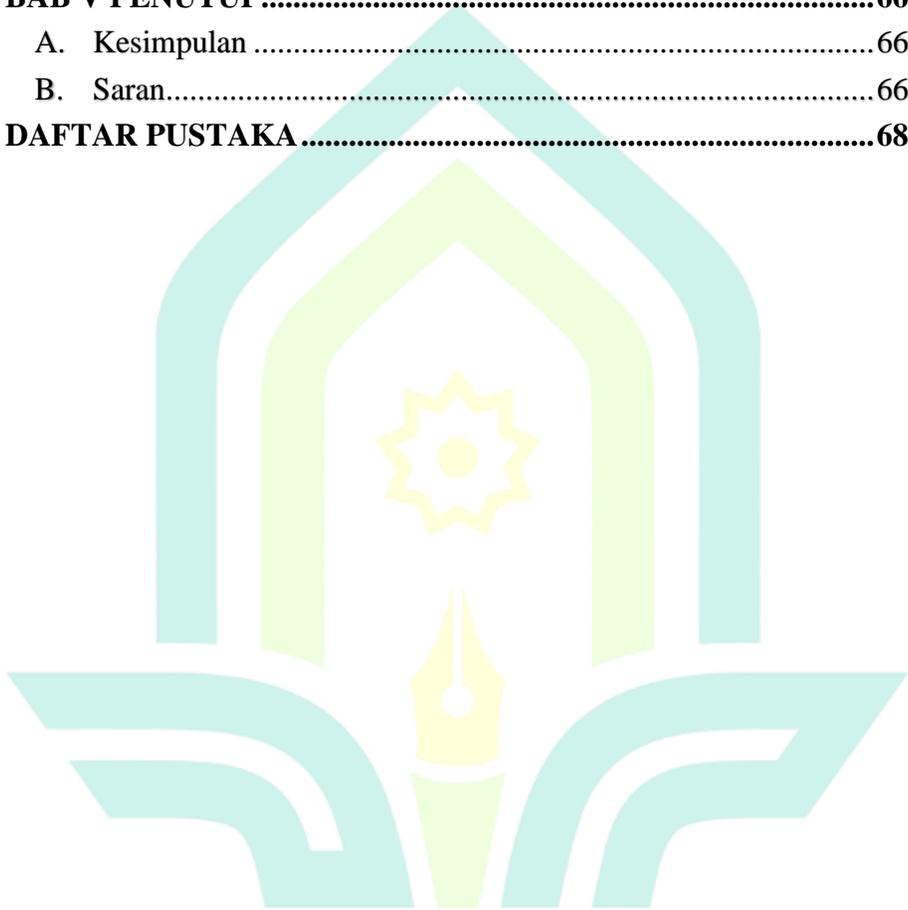
 B. Akibat Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12
 Tahun 2019 dalam Pengelolaan Arsip Hukum58

BAB V PENUTUP.....66

 A. Kesimpulan66

 B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA.....68



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan	7
Gambar 3.1 Peta Kota Pekalongan	26
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ..	26
Tabel 3.3 Daftar Informan	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di masa ini semakin menuntut kebutuhan akan informasi bagi setiap organisasi maupun instansi. Dikarenakan semua kegiatan organisasi memerlukan informasi sebagai pendukung dari proses kerja administrasi maupun pelaksanaan fungsi manajemen. Salah satu sumber utama yang dapat membantu kita dalam menunjang proses kegiatan administrasi adalah arsip.¹

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini arsip memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena arsip berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah, juga dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi.²

Arsip harus bersifat autentik, informasinya utuh, berdasarkan azas asal usul dan aturan asli sehingga dapat

¹ Qumayratul Layliyah, "Tata Kelola Pengarsipan Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 203– 7, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.403>.

² Lely Indah Mindarti, Choirul Saleh, Aulia Puspaning Galih, *PEMBERDAYAAN PELAYANAN DAN TATA KELOLA KEARSIPAN DI KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hal 76

digunakan sebagai alat bukti yang sah. Era perkembangan teknologi, arsip sekarang dapat berbentuk video, audio dan digital. Arsip dapat menjadi bukti yang bagi suatu tindakan dan keputusan karena sifatnya yang asli dan sah tersebut. Arsip sebagai ingatan, sumber sejarah, dan pusat informasi, sudah seharusnya dikelola sebaik mungkin agar kegiatan tertib administrasi berjalan dengan lancar dan tercipta pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip bisa berdampak pada proses kegiatan administrasi suatu organisasi. Upaya pengelolaan arsip pada suatu organisasi belum menjadi perhatian serius dan masih dianggap remeh. Mereka menganggap kegiatan mengelola arsip ialah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan sehingga masih banyak organisasi pemerintah maupun swasta menyerakan kegiatan pengurusan arsip kepada sumber daya manusia atau karyawan yang kurang memahami prosedur kearsipan. Hal itu berdampak terhadap pengelolaan arsip yang tidak optimal, dimana akan banyak arsip yang tidak terjaga secara kondisi dan informasi arsip sulit ditemukan.³

Tata kelola arsip pada Kantor Kearsipan tidak lepas dari fungsi manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan yang efisien dan efektif mempunyai pengaruh yang besar untuk penelusuran dan pencarian data atau informasi yang baik bagi pimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam manajemen kearsipan terdapat kegiatan-kegiatan antara lain: penciptaan, penggunaan, penyimpanan aktif, pemindahan menjadi penyimpanan inaktif, dan pemusnahan atau pemindahan menjadi arsip historis. Sistem manajemen dokumen merupakan pengelolaan dokumen yang dikembangkan untuk mengatur dan mengelola dokumen-dokumen penting agar mudah untuk dicari dan ditemukan

³ Muhammad Fachri, *Manajemen Arsip Dinamis Produk Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, Universitas Sriwijaya, 2023, hal 5

kembali.⁴

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kearsipan untuk mengelola arsip termasuk arsip hukum. Adapun produk hukum yang dikelola di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yaitu antara lain Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, Instruksi Walikota dan Keputusan Walikota. Dokumen-dokumen itu sendiri perlu dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini biasa disebut dengan sistem manajemen dokumen.⁵

Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa dalam pengelolaan arsip produk hukum belum maksimal karena ada beberapa kendala dan ada beberapa aspek pengelolaan arsip produk hukum yang belum dilakukan secara sistematis.⁶ Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menyebutkan bahwa “pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari penyelenggara Pemerintahan Daerah”. Namun di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan belum melaksanakan retensi arsip tersebut dan belum menerapkan pemusnahan dan penyerahan dalam rangka penyusutan arsip. Jadi ketika arsip yang sudah tidak aktif atau sudah habis masa retensi nya harus dilakukan penyusutan untuk menentukan arsip mana yang perlu dipertahankan, dipindahkan, atau dihancurkan setelah jangka waktu tertentu. Ini penting untuk menjaga efisiensi pengelolaan arsip dan menghindari penumpukan dokumen yang tidak perlu. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap Perda kearsipan

⁴ Eka Setiyawati, *Optimalisasi Tata Kelola Kearsipan*, *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal 37

⁵Yani Kurnia, Sukaesih, Encang Saepudin, “*Manajemen Dokumen Produk Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat*”, *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol.4, No.1, 2016, hal. 38.

⁶ Ritmika Serenady, Staff Bagian Hukum, Observasi (Pekalongan, 9 Oktober 2024. Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Pekaongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan menyebutkan “Pembinaan kearsipan meliputi: d. sosialisasi kearsipan; e. pendidikan dan pelatihan kearsipan” Namun di Bagian Hukum Sekretariat Daerah belum adanya pendidikan dan pelatihan kearsipan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip yang menyebabkan staff jadi memiliki peran dobel. Hal ini disebabkan karena belum adanya tenaga arsiparis yang mampu mengkoordinir terkait pemusnahan arsip. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum?
2. Bagaimana akibat hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum.
2. Menganalisis akibat hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan maka adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang membutuhkan serta dapat di kembangkan oleh peneliti peneliti berikutnya dalam kajian tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Melalui penelitian yuridis empiris, yang mana mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan menggunakan teori penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan penelitian meningkatkan pelaksanaan kegiatan kearsipan di Kota Pekalongan .
- b. Sebagai sumbangan data ilmiah mengenai pengelolaan arsip produk hukum.

E. Kerangka Teori

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan beberapa kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam membuat penelitian yang berkenaan dengan judul yang dipilih. Kerangka teori ini akan dijadikan sebagai landasan penulis dalam menelisik lebih jauh penelitian.

1. Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence

M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.⁷

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik dari skripsi, tesis, jurnal, dan penelitian non skripsi namn dengan focus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

⁷ Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hal.123

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Manajemen Arsip Dinamis Produk Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ⁸	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai yang telat mengembalikan arsip, ruang penyimpanan belum tersentralisasi, pelaksanaan penyusutan arsip belum diterapkan, fasilitas belum memadai dan belum terdapat tenaga arsiparis. pada penelitian ini dapat diketahui bahwa proses manajemen arsip dinamis dokumen produk hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum diterapkan sesuai dengan prosedur kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	Persamaan Penelitian ini sama sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan Dalam penelitian Muhammad Fachri lebih berfokus pada manajemen arsip dinamis nya Sedangkan penelitian ini berfokus penegakan peraturan daerah tentang kearsipan.
2.	Sistem dan Prosedur Kearsipan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ⁹	Sistem kearsipan pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten siak berjalan dengan cukup baik.	Persamaan Penelitian yang dilakukan sama sama menggunakan

⁸ Muhamad Fachri, *Manajemen Arsip Dinamis Produk Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi, (Sumatera, 2023)

⁹ Arif Efendi, *Sistem dan Prosedur Kearsipan pada Bagian Umum*

		<p>Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan arsip pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten siak yaitu kurangnya perhatian petugas arsip terhadap arsip serta masih kurangnya pembinaan petugas arsip dan kurang telitinya petugas arsip. Sehingga masih terjadi kehilangan arsip dan sulit menemukan arsip kembali.</p>	<p>penelitian lapangan Perbedaan Penelitian Arif Efendi berfokus pada faktor Pengaruh dari kurang efisiennya kearsipan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian ini Membahas terkait penegakan peraturan daerah tentang kearsipan.</p>
3.	<p>Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang. Sebagian wilayah di Kota Semarang pemasangan reklame belum optimal. Akibat hukum dari pelanggaran pemasangan reklame tersebut berupa sanksi denda dan pembongkaran. Selain</p>	<p>Persamaan Sama-sama membahas mengenai penegakan hukum. Perbedaan Jurnal Della Cahaya Ningrum membahas terkait penegakan reklame sedangkan skripsi ini membahas mengenai penegakan peraturan daerah tentang kearsipan.</p>

		itu, penegakan hukum mengalami hambatan berupa faktor internal yang berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan informasi dan minimnya koordinasi antar penegak, adapula faktor eksternal yang menghambat berasal dari pemasangan reklame yang tidak berizin atau illegal.	
4.	“Implementasi Standar Operasional Prosedur(SOP) Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ¹⁰ ”	Hasil penelitian mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur(SOP) dalam kegiatan pengelolaan arsip dinamis inaktif pada Biro Hukum telah di dapatkan hasil kegiatan pengelolaan arsip dinamis inaktif lebih efektif dan efisien karena SOP yang jelas serta mudah di pahami sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan yang mengatur secara detail bagaimana alur pengelolaan arsip dinamis inaktif.	Persamaan Sama sama terkendaladalam hal sumber daya manusia dalam bidang kearsipan. Perbedaan Skripsi Widya Rahayu lebih membahas terkait SOP pengelolaan arsip Dinamis Inaktif nya, itu bagian dari macam macam arsip. Sedangkan pada penelitian ini membahas penegakan peraturan daerah tentang kearsipan.

¹⁰ Widya Rahayu, “*Implementasi Standar Operasional Prosedur(SOP) Pengelolaan ArsipDinamis Inaktif pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah*”, 2023

5.	<p>Pengelolaan Arsip Produk Hukum di Sekretariat DPRD DIY (ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis¹¹)</p>	<p>Pengelolaan arsip yang belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Pertama, pengelolaan arsip produk hukum DPRD DIY belum menerapkan alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip. Kedua, pengelolaan arsip produk hukum DPRD DIY belum menerapkan pemusnahan dan penyerahan dalam rangka penyusutan arsip. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan alih media arsip, belum adanya jadwal retensi arsip sebagai pedoman penyusutan arsip, dan kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip</p>	<p>Persamaan sama sama membahas mengenai pengelolaan arsip produk hukum. Perbedaan Skripsi Fitri Susiani lebih mengerucut menggunakan Peraturan Gubernur terkait pengelolaan arsipnya. Sedangkan penelitian ini dengan menggunakan penegakan hukum peraturan daerah tentang kearsipan.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan tesis tersebut kajian yang akan dibahas berbeda, baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek pendekatan, serta sudut pandang yang

¹¹ Fitri Susiani, “*Pengelolaan Arsip Produk Hukum di Sekretariat DPRD DIY (ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis)*”, 2022

digunakan dalam penelitian. Jadi penelitian yang akan dibahas tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu terkait “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini didasari oleh metode penelitian sebagai landasan bagi penulis, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris atau non-doktrinal. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, atau hasil penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian.¹² Pada penelitian ini memakai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang disesuaikan dengan realitas di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan disini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena tersebut atau bisa diartikan pengamatan objek secara terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi yang dilaporkan secara ringkas dan jelas. Laporan-laporan ini mencakup hal-hal yang ditunjukkan kepada Bagian

¹² M. Yahya Harahap, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.¹³

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini yaitu di Kota Pekalongan. Pengambilan lokasi penelitian hukum empiris disesuaikan dengan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian pada pengelolaan arsip produk hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan.

4. Sumber data

Sumber data dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan staff di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari data yang sudah ada, artinya gabungan dari beberapa pihak yang diolah pihak lain, serta sudah dipublikasikan. Sumber data sekunder mencakup dua bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan hukum yang paling penting, mencakup peraturan perundang-undangan yakni:

¹³ Jonathan Sarwono, "Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif : Mungkinkah?", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9 no.2 (2009): 119-132 <https://media.neliti.com/media/publications/98208-ID-memadu-pendekatan-kuantitatif-dan-kualit.pdf>

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kearsipan.
- d) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- e) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
- f) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- g) Peraturan Wali kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- h) Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.5/0020 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pemeliharaan, Penataan dan Penyusutan Arsip Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penjelas dari bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, dan undang-undang, serta dokumentasi arsip yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan, dan ketersediaan sumber data, maka peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan keadaan, waktu, biaya serta pertimbangan lain demi tercapainya penelitian yang efektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dengan melalui tanya jawab atau bertukar informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur mendalam yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan peneliti melakukan penelitian secara mendalam. Adapun tempat yang peneliti pilih yaitu di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Analisis Interaktif. Yang dalam proses penelitiannya melalui 4 tahapan, yaitu: 1.) Pengumpulan data: data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. 2.) Reduksi data adalah : proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 3.) Penyajian data adalah: kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 4.) Penarikan kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Penelitian dengan

menggunakan analisis interaktif ini data yang didapatkan dari lapangan.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Yang tercantum dalam sistematika untuk penulisan penelitian ini yaitu dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertujuan untuk tercapainya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga perlu adanya sistematika yang diantaranya seperti berikut :

BAB I : yang berisi Pendahuluan yang didalamnya tercantum mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II : merupakan Landasan Teori yang memuat bahasan terkait penegakan hukum peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan

BAB III : Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang hasil penelitian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Produk Hukum.

BAB IV : Bab ini akan membahas pembahasan dari penelitian. Penulisan secara sistematis membahas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Hukum.

BAB V : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari bab-bab sebelumnya, dan memuat saran- saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.

¹⁴ Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup kompleks dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Secara praktik di lapangan, pengelolaan arsip produk hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan masih belum optimal. Hal ini terbukti dari tidak dilaksanakannya retensi arsip secara berkala, tidak adanya pemusnahan arsip yang telah kadaluwarsa, serta belum tersedianya sumber daya arsiparis yang profesional. Selain itu, ketiadaan SOP dan minimnya sosialisasi turut memperburuk kesadaran hukum aparatur dalam memahami pentingnya kearsipan sebagai bagian dari sistem administrasi yang tertib dan akuntabel.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 belum berjalan dengan baik. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak administratif seperti tumpukan arsip dan hilangnya dokumen penting, tetapi juga mengarah pada potensi maladministrasi dan melemahnya akuntabilitas publik. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya yang bersifat komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, perumusan regulasi teknis berupa SOP, perbaikan sarana prasarana, hingga penguatan budaya hukum melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Sinergi lintas instansi dan komitmen politik yang kuat menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi perda ini secara berkelanjutan dan profesional.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2019. Salah satunya melalui pembentukan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan menyeluruh dalam pengelolaan arsip produk hukum. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat fungsi koordinasi lintas instansi serta rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang kearsipan kepada seluruh aparatur, guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perda.

Dalam mencegah dampak hukum yang merugikan akibat pengelolaan arsip yang tidak sesuai ketentuan, seperti hilangnya dokumen penting atau potensi maladministrasi. Maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan harus memperkuat tata kelola arsip secara internal. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perda juga perlu dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Oleh Karenannya, keberadaan Perda Nomor 12 Tahun 2019 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberi pengaruh nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi birokrasi di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Yolatin. “*Pengelolaan Kearsipan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi Di Sma Negeri 1 Kota Tangerang Selatan,*” 2021.
- Astomo, Putra. “*Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 64 (2014).
- Astuti, Rika Zuli, Joko Kumoro, *Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Fakultas Ekonomi, and Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fauzi, Al Thareq Nur, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari. “*Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang).*” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 399–416. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18730>
- Hartanto, Hartanto, Djoko Budiarto, and Hyronimus Rhiti. “*Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital.*” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 95. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1100>
- Indah Mindarti, Lely, Choirul Saleh, and Aulia Puspaning Galih. “*Pemberdayaan Pelayanan dan Tata Kelola Kearsipan di Kelurahan Merjosari Kota Malang*” *Jurnal Pengabdian Masyarakat JDINAMIKA* 5, no. 1 (2020).
- Karunia, Ana Aniza. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.
- Karnati Neti, *Manajemen Perkantoran Analisis Teori dan Aplikasi dalam Organisasi Pendidikan*, (Aceh: CV. Bunda Ratu) 2019
- Layliyah, Qumayratul. “*Tata Kelola Pengarsipan Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.*” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 203–7.

- Munawaroh Faridatul, *Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Pengelolaan Arsip di Sekolah*, Jurnal Al-Afkar Vol. V, No. 2, 2017
- Meirinawati dan Indah Prabawati, *Manajemen Kearsipan untuk Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien*, Jurnal SNPAP “Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran: Tantangan dan Peluang”, 2015, hal. 180
- M. Yahya Harahap, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. “Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.37812/fikroh.v9i1.45>
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977),
- Rahayu, W. (2023). *Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Simatupang, Yusuf Juniansen. “*Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”(Studi Putusan Nomor:112/Pid.B/2019/PN.Bnj),” 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Susiani, F. (2022). *Pengelolaan Arsip Produk Hukum di Sekretariat DPRD DIY (Ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- Wahyudi, Tony Agus, Endeh Suhartini, and Danu Suryani.

“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004.” Karimah Tauhid 3, no. 1 (2024): 1035–65.

<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairum Ninsa
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 20 Februari 2003
Alamat : Desa Ambokembang Gg 12 RT 33 RW 16
No. 1014 Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
Nama Ayah : Mohammad Sulaiman
Nama Ibu : Kusrini
Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah 02 Pekajangan
SMP Negeri 1 Kedungwuni
SMA Negeri 1 Kedungwuni
Email : ninsakhairum76@gmail.com

